

Analisis Pendapatan dan Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sarolangun

Bahrudin; Syaparuddin; Hardiani

Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Abstract. The purpose of the research entitled 'An Analysis of Income and Expenditure Patterns of the Poor Households di Sarolangun Regency', they are: *First*, to analyze the poor households income in Sarolangun Regency. *Second*, to analyze the education level of the poor households in Sarolangun Regency. *Third*, to analyze the expenditure pattern of the poor households in Sarolangun Regency. *Forth*, to analyze the poor households income's inequality in Sarolangun Regency. The result of the research shows that, *First*; the monthly average of poor households income in Sarolangun Regency is Rp.852.057,- each family. *Second*, in the education level point of view, 90,6% of the poor household only completed their Elementary School. *Third*, in the expenditure-pattern point of view, in average, the expenditure-pattern of 72,96% poor households in Sarolangun Regency spent their income in food consumption, other 12,07% spent their income in primary needs (electricity, gas, water) and the rest 14,97% for vary. It is indicate that the expenditure pattern of poor households in Sarolangun Regency still concern to the primary consumption. *Fourth*, the poor households income's inequality in Sarolangun Regency in average is 0,30.

Keywords: primary need, expenditure pattern, income's inequality

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara dalam mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Proses pembangunan menyangkut berbagai aspek baik lahiriah (material), maupun batiniah (spiritual) dengan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya dengan konsep pemerataan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks yang perlu dipecahkan saat ini. Kemiskinan terjadi sebagai akibat ketidak mampuan dalam pemenuhan kebutuhan yang saling berkaitan, hingga ke generasi berikutnya. Pemenuhan kebutuhan ini mencakup *physiological deprivations*, sosial, politik, budaya dan sumberdaya. Peningkatan kemiskinan di Indonesia tahun 1997-1998

menunjukkan krisis multidimensional yang telah membalikkan trend penurunan kemiskinan menjadi kenaikan hingga mencapai 49,50 juta jiwa (atau 24,23 persen). Dan mengalami penurunan kembali hingga menjadi 28,59 juta jiwa atau 11,66% dari populasi penduduk pada tahun 2012 (Berdasarkan survei BPS menggunakan *nilai garis kemiskinan*)

Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia juga dibayang-bayangi oleh keberadaan kelompok masyarakat "Hampir Miskin" yang berada pada tingkatan sedikit di atas garis kemiskinan dan sangat rentan untuk sewaktu-waktu masuk menjadi kelompok miskin apabila terjadi tekanan eksternal, seperti kenaikan harga bahan pokok, kenaikan harga BBM dan listrik, pemutusan hubungan kerja (PHK), konflik sosial maupun bencana alam kelompok ini menjadi kelompok miskin.

Kompleksitas anatomi kemiskinan tersebut menyebabkan permasalahan kemiskinan tidak hanya dapat diatasi dengan pendekatan ekonomi semata, namun sangat terkait dengan dinamika sosial, politik dan budaya yang melekat dalam suatu komunitas, sehingga pengentasan kemiskinan bersifat multidimensi sangat memerlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta antar Sektor dan antar Regional.

Sebagai salah satu daerah di Indonesia, Kabupaten Sarolangun juga menghadapi fenomena yang sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia maupun. Jumlah penduduk miskin dikabupaten pada tahun 2012 sebanyak 25.490 jiwa atau 9,70 persen dari jumlah penduduk yang ada. Dengan tren penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup konsisten. Sebagai bukti dari kebijakan pembangunan melalui program-program bedah rumah, pemberian sertifikat gratis, pendidikan gratis, berobat gratis, memberikan bantuan bibit karet gratis, bantuan ternak dan cetak sawah baru. Dengan adanya program unggulan yang langsung menyentuh masyarakat tersebut, diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Sarolangun dapat cepat teratasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian bertujuan untuk: *Pertama:* Menganalisis pendapatan rumah tangga miskin di Kabupaten Sarolangun. *Kedua:* Menaganalisis tingkat pendidikan rumah tangga miskin di Kabupaten Sarolangun. *Ketiga:* Menganalisis pola pengeluaran rumah tangga miskin di Kabupaten Sarolangun. *Keempat:* Menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan rumah tangga miskin di Kabupaten Sarolangun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei. Metode penarikan sampel dilakukan secara *Multistage Sampling* yang dilakupan pada 5 kecamatan yang ada di Kabupaten

Sarolangun. Jumlah sampel mengacu pada formulasi *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Presisi yang ditetapkan atau diharapkan

Jumlah populasi (KK) miskin pada 5 Kecamatan terpilih adalah 2.334 KK, dengan presisi yang digunakan 0,05 (5%).

Metode Analisis Data

Untuk analisis tujuan pertama dan kedua menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan dan mempermudah penafsiran yang dilakukan dengan membaca tabel dan grafik untuk melihat berbagai fenomena berdasarkan teori-teori, literatur. Untuk tujuan ketiga digunakan model *Indeks Gini Ratio (GR)*, sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum f_i (Y_i + Y_{i-1})$$

f_i : Jumlah Persen (%) penerima pendapatan pada kelas ke *i*.

Y_i : Jumlah Komulatif (%) pendapatan pada kelas ke *i*

Dengan kriteria ketimpangan pendapatan seperti tabel berikut ini :

Tabel 1. Kriteria Tingkat Ketimpangan Pendapatan

Angka Gini Ratio (GR)	Tingkat Ketimpangan
0,50 – 0,70	Tinggi
0,36 – 0,49	Sedang
0,20 – 0,36	Rendah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Rumah Tangga Miskin

Secara rata-rata pendapatan keluarga rumah tangga miskin di Kabupaten Sarolangun adalah sebesar

Rp.852.057,- per keluarga per bulan. Sedangkan pendapatan tertinggi sebesar Rp.3.000.000,- dan terendah adalah sebesar Rp. 120.000,- per keluarga per bulan.

Tabel 2. Pendapatan Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sarolangun Tahun 2013

No	Kecamatan	Pendapatan (Rp)		
		Tertinggi	Terendah	Rata-Rata
1	Sarolangun	1.600.000	500.000	1.056.000
2	Pauh	3.000.000	120.000	809.206
3	Air Hitam	1.500.000	200.000	862.715
4	Limun	1.300.000	200.000	611.205
5	Mandiingin	2.500.000	400.000	921.161
	Kabupaten	3.000.000	120.000	852.057

Sumber : Data Olahan Hasil Survey 2013

Faktor pemicu kemiskinan di lima kecamatan di kabupaten ini didasari oleh; *Pertama*; masih rendahnya tingkat pendidikan; *Kedua*: bekerja sebagai buruh, atau petani tanpa pekerjaan sampingan; *Ketiga*: rendahnya akses informasi; *Keempat*: belum adanya bantuan dari pemerintah; *Kelima*: tidak mempunyai skill (*life Skill*); Dan *Keenam*: tidak memiliki aset (rumah, tanah olahan, ternak).

Tingkat Pendidikan Rumah Tangga Miskin

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan keluarga rumah tangga miskin di Kabupaten Sarolangun tergolong masih rendah teruma di perdesaan. Hanya sebagian kecil masyarakat yang berpendidikan setingkat SLTA, khususnya bagi masyarakat kelurga rumah tangga miskinnya. Padahal, berdasarkan fakta yang ada kinerja bidang pendidikan di kabupaten ini menunjukkan tren meningkat, namun pada tingkat keluarga rumah tangga miskin masih jauh dari peningkatan (kemunduran). Hal ini

sangat jauh dari program yang di canangkan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Terlihat jelas pada Tabel 3, 90,6 persen tingkat pendidikan pada keluarga rumah tangga miskin di Kabupaten Sarolangun hanya tamat Sekolah Dasar (SD) dan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), sementara 6,5 persennya tamat SLP ataupun yang sederajat dan 2,9 persen yang tamat SLTA/ sederajat. Permasalahan seperti ini merupakan problem yang sangat sulit untuk di rubah, kita tahu bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas pola berfikir dari keluarga rumah tangga miskin dalam mendapatkan pekerjaan, dan menjalankan usaha.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sarolangun Tahun 2013

No	Kecamatan	SD		SLTP		SLTA		Tidak Tamat SD	
		Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)
1	Sarolangun	14	56,0	2	8,0	3	12,0	6	24,0
2	Pauh	52	82,5	-	-	-	-	11	17,5
3	Air Hitam	56	94,9	1	1,7	2	3,4	-	-
4	Limun	24	61,6	2	5,1	-	-	13	33,3
5	Mandiingin	122	78,1	17	11,0	5	3,2	11	7,1
Kabupaten		268	78,6	22	6,5	10	2,9	41	12,0

Sumber: Data Olahan Hasil Survey 2013

Terlihat jelas pada tabel diatas, 90,6 persen tingkat pendidikan pada keluarga rumah tangga miskin di Kabupaten Sarolangun hanya tamat Sekolah Dasar (SD) dan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), sementara 6,5 persennya tamat SLP ataupun yang sederajat dan 2,9 persen yang tamat SLTA/ sederajat. Permasalahan seperti ini merupakan problem yang sangat sulit untuk di rubah, kita tahu bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas pola berfikir dari keluarga rumah tangga miskin dalam mendapatkan pekerjaan, dan menjalankan usaha.

Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin

Pola konsumsi juga lazim digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. hal ini dilihat dari pergeseran pola pengeluarannya dari pengeluaran untuk konsumsi menuju pengeluaran non konsumsi. Pola konsumsi yang dimaksud adalah jumlah persentase dari distribusi pendapatan terhadap masing-masing pengeluaran pangan, sandang, jasa-jasa serta rekreasi dan hiburan. BPS menyatakan kategori pengeluaran makanan, perumahan, pakaian, barang, jasa, dan pengeluaran non konsumsi seperti untuk usaha dan lain-lain

pembayaran. Secara terperinci pengeluaran konsumsi adalah semua pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, pesta atau upacara, barang-barang lama, dan lain-lain yang dilakukan oleh setiap anggota rumah tangga baik itu di dalam maupun di luar rumah.

Berdasarkan analisis penelitian pada kepala keluarga rumah tangga miskin, diperoleh hasil bahwa Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sarolangun secara rata rata 72,96 persen dari seluruh pengeluarannya habis untuk konsumsi bahan makanan dan 12,07 persen untuk kebutuhan pokok bukan bahan makanan (listrik, gas, air). Sisanya 14,97 persen konsumsi lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pola pengeluaran rumah tangga miskin di Kabupaten Sarolangun masih pada konsumsi primer, seperti pada Tabel 4 berikut:

Tabel 3. Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Bahan Makanan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sarolangun Tahun 2013

NO	Jenis Bahan Makanan	Rata-Rata Pengeluaran	
		(Rp)	(%)
1	Beras	135.989	15,96
2	Umbi-umbian	23.435	2,76
3	Ikan dan Sejenisnya	150.666	17,68
4	Daging	-	-
5	Telur dan Susu	17.496	2,05
6	Sayur-sayuran	144.173	16,92
7	Minyak, Bumbu, Konsumsi Lainnya	149.896	17,59
8	Buah-buahan	-	-
Jumlah		621.655	72,96

Sumber : Data Olahan Hasil Survey 2013

Tabel 4. Pengeluaran Konsumsi Bahan Bukan Makanan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sarolangun Tahun 2013

NO	Jenis Bahan Bukan Makanan	Rata-Rata Pengeluaran	
		(Rp)	(%)
1	Listrik, Air dan Gas	102.889	12,07
2	Pembayaran Lainnya (kosmetik, sabun, alas kaki, tutup kepala, pembelian pulsa)	127.513	14,97
Jumlah		230.402	27,04

Sumber : Data Olahan Hasil Survey 2013

Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Miskin

Masalah distribusi pendapatan mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah bagaimana menaikkan tingkat kesejahteraan mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sedang aspek kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti memper sempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk atau rumah tangga miskin. Keberhasilan mengatasi aspek yang pertama dapat dilihat dari penurunan persentase penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Sementara keberhasilan memperbaiki

distribusi pendapatan secara menyeluruh, adalah jika laju pertambahan pendapatan golongan miskin lebih besar dari laju pertambahan pendapatan golongan kaya.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat, karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas.

Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Walau pun titik perhatian utama adalah pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan (assets), namun hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas. Misalnya ketidakmerataan kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan untuk memilih, dan lain-lain.

Dari hasil analisis dengan menggunakan model Indeks Gini Rasio maka diperoleh ketimpangan pendapatan rumah tangga miskin di Kabupaten Sarolangun adalah sebesar 0,30, yang menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan keluarga rumah tangga miskin di Kabupaten Sarolangun masih tergolong rendah. Artinya dari sisi pendapatan keluarga rumah tangga miskin di kabupaten ini cukup merata atau tidak terlihat kesenjangan pendapatan yang berarti. Kondisi ini sebaiknya diikuti juga dengan peningkatan pendapatan pada keluarga rumah tangga miskin.

Tabel 5 memberikan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan keluarga miskin (Gini Ratio) pada 5 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun:

Tabel 5. Gini Ratio Lima Kecamatan di Kabupaten Sarolangun 2013

NO	Kecamatan	Gini Ratio
1	Sarolangun	0,16
2	Pauh	0,23
3	Air Hitam	0,23
4	Limun	0,23
5	Mandiingin	0,33
Kabupaten		0,30

Sumber : Data Olahan Hasil Survey 2013

Terlihat Jelas bahwa ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi pada Kecamatan Mandiingin (0,33) sedangkan ketimpangan pendapatan terendah adalah Kecamatan Sarolangun (0,16).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara rata-rata pendapatan keluarga rumah tangga miskin di Kabupaten Sarolangun adalah sebesar Rp.852.057,-. per keluarga per bulan.
2. Umumnya (90,6 persen) tingkat pendidikan keluarga rumah tangga miskin di Kabupaten Sarolangun hanya tamat Sekolah Dasar (SD) dan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), sementara 6,5 persennya tamat SLP ataupun yang sederajat dan 2,9 persen yang tamat SLTA/ sederajat
3. Dilihat dari pola pengeluarannya, bahwa Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sarolangun secara rata rata 72,96 persen dari seluruh pengeluarannya habis untuk konsumsi bahan makanan dan 12,07 persen untuk kebutuhan pokok bukan bahan makanan (listrik,gas,air). Sisanya 14,97 persen konsumsi lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pola peneluaran rumah tangga miskin di Kabupaten Sarolangun masih pada konsumsi primer.

4. Dari hasil analisis data yang ada, secara rata-rata tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau Gini Ratio keluarga rumah tangga miskin di Kabupaten Sarolangun adalah 0,30. Artinya tingkat distribusi pendapatan dikabupaten ini secara rata-rata tergolong rendah.

Saran

1. Pemerintah perlu melakukan identifikasi keluarga miskin absolut dan miskin relatif, untuk diberikan pelatihan skill, pemberian modal kerja, penyediaan lapangan kerja.
2. Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas pelayanan publik terutama sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan pendidikan, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi keluarga rumah tangga miskin.
3. Meningkatkan fokus program kerja yang berbasis pada pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan Efektifitas dan pemerataan pelaksanaan program pembinaan, pendampingan, dan implementasi program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1992. *Memahami Masalah Kemiskinan di Indonesia : Suatu Pengantar*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol.VII, No.1, Hal: 95-116.
- Adnyana dan Rita. 2000. *Penerapan Indeks Gini Untuk Mengidentifikasi Tingkat Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga di Wilayah Jawa dan Bali*. Available at [http://ejournal unud.ac.id](http://ejournal.unud.ac.id).
- Adger, W. Neil. 1999. *Exploring Income Inequality in Rural, Coastal Vietnam*. The Journal of Development Studies, Vol.35 No.5 Juni, pp. 96-119.

- Anwar, Syamsul. 2002. *Kajian Ekonomi Tentang Kemiskinan di Perdesaan Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vo.7, No.2, Hal : 103-111.
- Bappeda Kabupaten Sarolangun 2013. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013*. Laporan Penyusunan SPKD Tahun 2013.
- Firmanzah. 2012. *Penangggulangan Kemiskinan Multi-Approach Strategy*, www. Setkab.go.id.
- Handayani, Boa. 2008. *Analisis Model Kemiskinan Perdesaan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 5, No.1, Hal:16-22.
- Hendra, Agustin. 2002. *Analisis Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Malang.
- Ida Komang Suwignya dan Andreas Budi Purnomo. 1991. *Pola Konsumsi Rumah Tangga Industri Kerajinan Kaleng di Desa Babakan Kabupaten Lombok Barat*.
- Junaidi dan Hardiani. 1999. *Pekerja Anak pada Keluarga Pedesaan di Kabupaten Tanjung Jabung Propinsi Jambi*. Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi, Universitas Jambi
- Kisworo Paso. 2004. *Pelaksanaan P2KP Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Mengurangi Kemiskinan di Kota Pekalongan*.
- Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2013. *Penguatan Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta 2013.
- Khairil Anwar. 2007. *Analisis Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Utara*.
- Lubis, Djohari. 2004. *Informasi Dasar Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Jakarta 2004.
- Lulus Prapti NSS. 2006. *Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan*.
- Mochamad Syawie. 2011. *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial*. Jurnal Eekonomi Pembangunan. Vol.16.No.3
- Mukherjee, Nilanjana. 1999. *Consultations With The Poor in Indonesia, Country Synthesis Report*. Draft report Agustus 1999 Wolrd Bank.
- Mehlum, Harvor. 2001. *Cavital Accumulation Unemployment and Self Fulfilling Failure of Economic Reform*. Jounal of Development Economics. Vol. 65 2001.
- Swaminathan, M. 1997. *The Determinant of Earning Among Low-Income warkers in Bombay; An Analisis of Panel Data*. The Journal of Development Studies, Vol. 33 No.4, April, pp. 535-551.
- Susilowati, S. Hery dkk. 2002. *Diversifikasi Sumber Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan*, Jurnal FAE, Vol. 20, No. 1, Hal : 85-109.
- Supadi dan Nurmanaf. 2004. *Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Pedesaan dan Kaitannya dengan Tingkat Kemiskinan*. Available at <http://ejournal.unud.ac.id>.
- Sugiarto. 2008. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Menurut Pola Pendapatan dan Pengeluaran di Pedesaan*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Dinamika

- Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Jakarta 2008.
- Tika Restiyani. 2010. *Pola Konsumsi Rumah Tangga Pekerja Pembuat Lantung di Desa Lemah Daur Kecamatan Kuarasan Kabupaten Kebumen*.
- White, Howar. 1992. *The Maccroeconomic Impect of Development Aid : Acritical Survey*. Dalam Syaparuddin 2002. *Beban Hutang Luar Negeri Indonesia Periode 1996-2000*. Hal. 82-96. *Jurnal Manajement dan Pembangunan FE Universitas Jambi*. Edisi Maret 2002.
- Yuliana Yacoub. 2012. *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kabupatern / Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.8, No.3, Hal : 176-185.